

Strategi Pemilihan Jenis Usaha dan Pola Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Tatik Zulaika*, Sri Lestari Hendrayati, Rini Oktavia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

*Email: tatik.zulaika@feb.upr.ac.id

Abstrak

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebut desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan berwenang untuk mengelola aset desa untuk meningkatkan perekonomian sehingga menjadi desa yang mandiri dan maju. Salah satu cara meningkatkan perekonomian desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Permendes no. 5 Tahun 2014. Namun sampai saat ini masih banyak BUMDes yang tidak berkembang dan tidak aktif. Banyak hambatan yang ditemui saat mengelola BUMDes, sebagai akademisi penulis tertarik untuk menerapkan IPTEKS melalui kegiatan pengabdian dengan tema “Strategi Pemilihan Jenis Usaha dan Pola Pengelolaan Keuangan BUMDes” dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, aparatur dan pengurus BUMDes bagaimana memaksimalkan potensi dan peluang desa menjadi unit usaha dan pemahaman akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini pendekatan deskriptif dengan metode ceramah/sosialisasi, survey, interaktif untuk menggali potensi dan peluang serta menggunakan metode WOTS-UP atau SWOT modifikasi. Sedang capaian luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian adalah TOT dan jurnal pengabdian masyarakat baik nasional maupun internasional. Berdasarkan analisis WOTS-UP dapat ditemukan strategi apa saja yang bisa dilakukan agar potensi yang ada dapat terwujud. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini bahwa sumberdaya manusia didesa Kanamit memiliki potensi dalam membuat produk yang berbasis kearifan local jika ditingkatkan akan menjadi produk andalan, walaupun disisi lain potensi sumberdaya alam kurang memiliki keunggulan. Diperlukan pembinaan/pendampingan dari pihak terkait.

Kata Kunci: *strategi-akuntansi BUMDes*

Pendahuluan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan basis ekonomi yang sebenarnya sudah dijalankan melalui berbagai program, namun upaya ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Salah satu faktor yang dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar akibatnya justru menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi desa. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat yang sifatnya membangun kepedulian dan

kemampuan masyarakat itu sendiri (Sandiasa, 2017:64). Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di desa tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di desa melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola

sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Permasalahan yang dihadapi BUMDes diantaranya: (a) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, (b) Pemerintahan Desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes, (c) dan tidak berjalannya BUMDes ((Pernamasari, Hanny, E Yulyana, R Ramdani, 2016). Selain itu masih kurangnya sumberdaya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMDes sehingga BUMDes dalam menjalankan fungsinya kurang maksimal.

BUMDes dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMDes (Anggraeni, 2016). Pemerintah sebagai pemilik modal berhak melakukan pengawasan namun tidak serta merta ikut menentukan operasi dan kebijakan perusahaan, sehingga terjadi pendelegasian wewenang kepada pengurus BUMDes secara professional mengelola bisnis yg menguntungkan. Hal yg menjadi tantangan bagi BUMDes dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan relasi dan dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya perlu dihindari.

Strategi dalam pembangunan ekonomi desa harus bertumpu pada sumber daya dan potensi lokal desa (Elisa dan Santoso, 2017). Menurut Soleh (2017) potensi lokal desa adalah segala daya, kekuatan dan kemampuan dari berbagai aspek yang memungkinkan untuk dikembangkan. Pembangunan ekonomi desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan usaha berskala kecil dan menengah (Tambunan, 2009). BUMDes dapat memberikan pinjaman dana modal usaha dan juga sebagai penampung produk usaha UMKM yang mengalami kesulitan pemasaran (Agung Gunanto EY, Arianti, F. Kushartono, EW dan Darwanto, 2016).

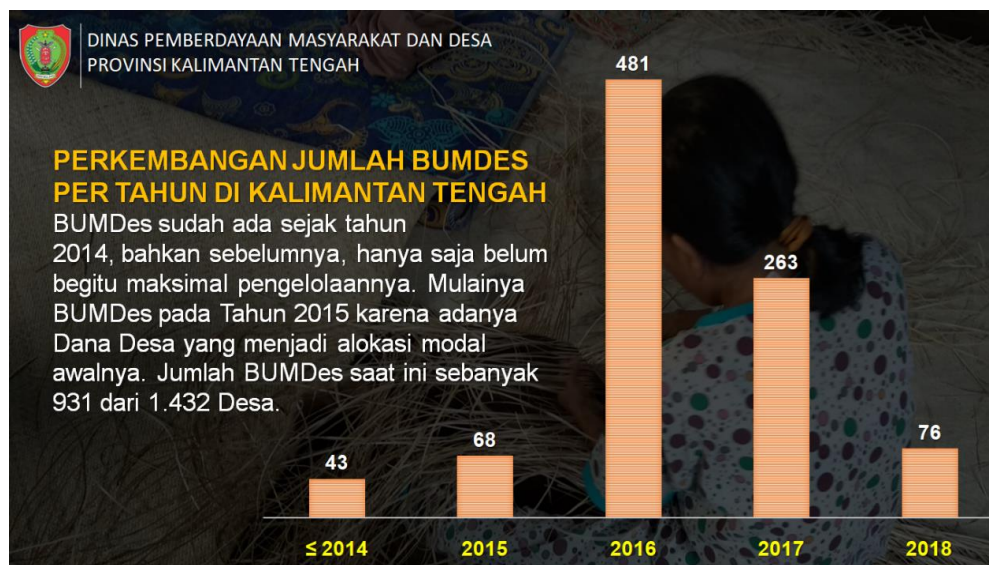
BUMDes dibentuk dengan penyertaan modal yang berasal dari keuangan desa APBDes. Kendala lain yang dihadapi BUMDes adalah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai SAK, Pencatatan setiap transaksi hanya sebatas mencatat kas masuk dan kas keluar tanpa memperhatikan kaidah akuntansi. Hal tersebut biasanya disebabkan karena belum adanya pemahaman perkembangan proses akuntansi dan membukukannya ke dalam laporan keuangan, karena laporan keuangan yang disusun nantinya akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan ekonomi (R Risal R Wulandari, J Jaurino, 2020)

Melihat perkembangan BUMDes pada Gambar 1. menunjukkan bahwa BUMDes sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2014 bahkan Tahun 2007 sebenarnya sudah didengungkan oleh pemerintah, namun kurang berkembang hal ini salah satunya disebabkan kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada usaha ekonomi yang dimiliki daerah terutama desa dan lebih memperhatikan badan usaha yang lebih besar, namun setelah munculnya UU Desa Tahun 2014 pendirian BUMDes meningkat secara signifikan walaupun pada tahun berikutnya banyak BUMDes yang kurang berkembang atau tidak aktif. Begitu pula kondisi BUMDes yang ada di Kalimantan Tengah.

Metode Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat berlokasi di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, adapun alasan pemilihan lokasi: Merupakan desa yang mendapat alokasi Dana Desa yang relatif sedang, memiliki unit usaha yang relatif tidak banyak. Serta BUMDes nya kurang aktif dan kurang berkembang. Estimasi waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada rentang waktu 6 bulan



Gambar 1. Perkembangan BUMDes di Kalimantan Tengah

Khalayak Sasaran atau Mitra. Adapun sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah: Masyarakat, karena keberhasilan pembangunan ekonomi desa tergantung dari keterlibatan, partisipasi dan kontribusi masyarakat bagi pelaksanaan dan keberhasilan program BUMDes. Aparatur desa dan BPD (badan permusyawaratan desa) merupakan pihak yang berperan dalam melakukan sosialisasi dan memberi kesadaran kepada masyarakat tentang artinya BUMDes dalam membantu usaha masyarakat dan memperkuat perekonomian desa: pengurus BUMDes, tidak hanya bermodalkan kepercayaan semata dalam mengurus BUMDes karena diperlukan kemampuan mengelola organisasi bisnis dan ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh pengurus BUMDes.

Hasil dan Pembahasan

Aktivitas Peserta

Kegiatan Pengabdian ini diikuti oleh Kepala Desa beserta aparatur Desa Kanamit, BPD, tokoh masyarakat, pengurus BUMDES serta mahasiswa dan kegiatan ini bertempat di Kantor Desa dengan menggunakan: Metode

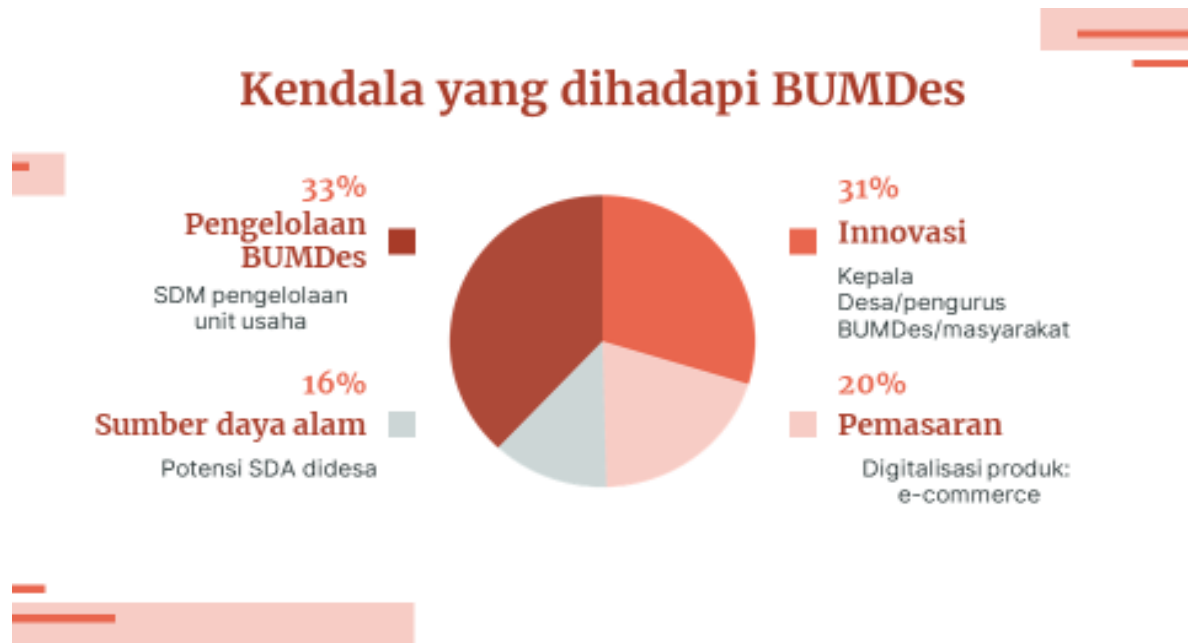
ceramah/sosialisasi: untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepala desa/aparatur desa dan pengurus BUMDes bagaimana memilih strategi jenis usaha, standar akuntansi yang digunakan dalam mengelola keuangan BUMDes. Metode survey/interaktif diketahui bahwa desa tersebut sebenarnya memiliki produk unggulan yaitu kerajinan masyarakat berupa anyaman rotan berbentuk keranjang yang digunakan mengangkut sawit dipunggung, dan produk ini sebenarnya sudah dipasok perusahaan sawit terdekat. Apabila bisa dikembangkan dari segi permodalan dan produksinya akan menjadi supplier utama bagi perusahaan secara berkelanjutan dan kerjasama dibidang yang lain sehingga masyarakat memperoleh pendapatan untuk peningkatan perekonomian desa. Metode interaktif/tanya jawab dengan masyarakat terkait perkembangan BUMDes rata-rata berpendapat bahwa badan usaha desa yang telah dibentuk dan sudah berjalan beberapa tahun masih mengalami kendala, dari sisi pengelolaan yang disebabkan kurangnya SDM yang memahami tentang pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes.



Gambar 2. Sosialisasi bersama Kepala Desa dan Pengurus BUMDes

Metode Analisis WOTS-UP: Metode analisis ini merupakan modifikasi dari analisis SWOT dimana dapat diperoleh hasil sbb:

No.	Potensi	Keunggulan	Kelemahan	Strategi
1.	Kebutuhan dasar, minimarket, pasar, toko sembako	Permintaan masyarakat yg meningkat	Masuk wilayah kecamatan	Membuat usulan ijin pengelolaan
2.	Perkebunan	Sengon dan buah-buahan	Budidaya yang tdk mengalami peningkatan	Penyuluhan perkebunan, membuat permintaan ke balai benih Kabupaten
3.	Perdagangan	Pemasok anyaman angkut sawit	Pemberdayaan masih kurang	Kontrak kerjasama berkelanjutan, marketing digitalisasi
4.	Pariwisata	Wisata air	Fasilitas penunjang	Inovasi dan kreatifitas
5.	Keuangan	Simpan pinjam bagi masyarakat	Permodalan dan agunan	Pengelolaan dan penyaluran
6.	Pelayanan/jasa	Permintaan pelayanan jasa meningkat	Minat usaha pelayanan jasa	Permodalan dan keahlian



Gambar 3. Grafik faktor-faktor yang menghambat BUMDes di Desa Kanamit

Kesimpulan

Berdasar hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan:

Masyarakat desa memiliki potensi membuat produk (*homemade*) yang bisa dijadikan produk andalan desa karena telah melakukan kerjasama dengan perusahaan terdekat. Sumber daya alam didesa kurang memiliki keunggulan sehingga tidak maksimal pemanfaatannya. Sumber daya manusia kurang diberdayakan sehingga potensi dan peluang usaha yang sebenarnya ada didesa kurang digali. Pengurus BUMDes bersama aparatur desa serta masyarakat kurang bersemangat dalam mengembangkan unit usaha.

Saran

Sebaiknya kepala desa dan aparatur bersama-sama dengan masyarakat lebih meningkatkan upaya pemberdayaan sehingga dapat ditemui potensi yang dimiliki. Melakukan kerjasama secara berkelanjutan dengan perusahaan untuk memasok produk

yang dibuat masyarakat. Semakin menambah/menimba pengetahuan terutama dari desa yang sudah maju bagaimana memajukan desa dan mengembangkan BUMDes Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memanfaatkan potensi desa menjadi potensi wisata air supaya memiliki nilai lebih, untuk bisa dipromosikan ke pihak luar desa.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui DIPA PNBPU Universitas Palangkaraya, Rektor Universitas Palangkaraya dan LPPM Universitas Palangkaraya serta Kelompok KKN Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau.

Daftar Pustaka

- AAZ Harmiati, AA Zulkhakim, 2017. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dlam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat . *Jurnal Unihaz*.
- Agung Gunanto et al., 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDes, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*,13 (1): 67-81.
- Anggraeni, M.R.R.S., 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), pp.155-168.
- Anom Surya Putra, Buku 7 BUMDes: Spirit Kolektif Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Elisa A F dan Santoso EB, 2017 Penentuan Faktor-faktor yang Berpengaruh di Kelurahan Kemas Kecamatan Krian, Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Tehnik ITS*, 6(2): C471-C476.
- FW Warjan, 2017. Roadmap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa. repository .ub.ac.id.
- G Sandiasa, I Widnyani, 2017,. Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Partisipasi pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan. *Locus Majalah Ilmiah, Fisip*.
- George, Panagiotou, “Bringing SWOT Into Focus”. *Businees Strategy Review* 14, Edisi 2 (2003): 8-10.
- P Hanny, et al, 2016. Efektifitas Pengelolaan BUMDes brbasis Ekonomi Kerakyatan di DEsa Warung Bambu Kecamatan Timur Karawang. *Jurnal Politicom Indonesiana*.
- Permendes No. 20 tahun 2018.
- Permendes No. 5. Tahun 2014.
- R Risal R Wulandari, J Jaurino. 2020. Pendampingan Akuntansi dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Cendekia Jurnal*, 2020 e-journal, uniska-kediri.ac.id.
- Tambunan, T. 2009. UMKM di Indonesia (ID), Ghalia Indonesia.
- UU Desa No. 6 Tahun 2014.